

## **PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Thimotina Killay<sup>1</sup>, Theresia Febiengry Sitanala<sup>2</sup>, & Janet W. Litaly<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi PSDKU, Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

E-mail thimotikillay@gmail.com

### ***ABSTRACK***

This study aims to see how the effect of the realization of village funds on the poverty level in Southwest Maluku Regency. The sample in this study is 2019, by using a combination of cross-sectional data with time series data. The results showed that village funds had an effect on the poverty rate of 50.8%. There is a simultaneous effect between the independent variable and the dependent variable and vice versa. By showing a significant value of 0.000 in the t-test and f-test, it can be concluded that the Village Fund has an effect on the level of poverty. Thus it can be concluded that with the realization of village funds as many as 57 villages with 172 reports of realization of village funds and the number of poor people from 2017, it will have an impact on the poverty level of Southwest Maluku Regency.

*Keywords: Village Fund, Poverty Level*

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh realisasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampel dalam penelitian ini adalah tahun 2019, dengan menggunakan kombinasi data cross sectional dengan data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap angka kemiskinan sebesar 50,8%. Terdapat pengaruh simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan sebaliknya. Dengan menunjukkan nilai signifikansi 0,000 pada uji-t dan uji-f, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan realisasi dana desa sebanyak 57 desa dengan 172 laporan realisasi dana desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 2017 akan berdampak pada tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya.

*Keywords: Dana Desa, Tingkat Kemiskinan*

### **PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia saat ini banyak di pengaruhi oleh ekonomi global yang fluktuatif, sehingga untuk menghadapi hal tersebut maka pemerintah mempererkuat fondasi ekonomi dengan strategi ekonomi yang menjadi acuan dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan, menjadi salah satu tantangan oleh pemerintah dalam meratakan pembangunan ekonomi di daerah-daerah kepulauan. Upaya Pemerintah Indonesia dengan membuat berbagai macam kebijakan dalam menyeimbangkan dampak ekonomi ke setiap daerah dan menjadi pendorong dalam membangkitkan potensi ekonomi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa

merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Perkembangan desa di dukung oleh pemerintah yaitu dengan adanya sumber-sumber pendapatan yang di anggarkan pemerintah dan potensi pendapatan asli desa. Sumber Pendapatan Desa: 1. Pendapatan Asli Desa 2. Dana Desa yang Bersumber dari APBN 3. Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota 4. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota 5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota 6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta 7. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah Salah satu sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 UU No 6 tahun 2014 yaitu Dana Desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi harapan untuk dapat menjawab kebutuhan yang ada di desa dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus di hadapi pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya sehingga bebas dari kemiskinan, Pemerintah Indonesia berupaya dan berusaha menjawab masalah tersebut berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan pancasila yang menyatakan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tujuan yang sama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat di harapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya pembangunan ke pelosok pelosok daerah kepulauan. Dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa yang menjadi bagian dalam proses percepatan pembangunan di desa-desa, maka di harapkan dapat menangani permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjadi perpanjangan tangan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang di realisasikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 15 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Layanan Rujukan terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2]

Berdasarkan data yang didapat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, provinsi Maluku masuk dalam kawasan 3T yaitu kawasan Terdepan, Terpencil, Tertinggal. Terdapat 8 kabupaten kota yang mejadi kawasan 3T dan salah satunya adalah kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan terluar, sehingga menjadi tantangan dalam menjawab program pemerintah dalam meratakan pembangunan. Kawasan 3T yang sekarang di sebut kawasan terafirmasi menjadi sorotan dalam menilai dana desa, alokasi dana desa

dan pendapatan desa lainnya apakah dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga peningkatan pembangunan dapat merata. Kawasan 3T merupakan kawasan Tertinggal, Terluar dan Terpencil bukanlah status yang membanggakan bagi tiap daerah, namun menjadi motivasi bagi tiap daerah untuk keluar dari predikat tersebut dengan berbagai cara. Aloksi dana desa di dapat untuk pemerataan pembagunan dan pengurangan angka kemiskinan di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai 21,37 ribu orang. Dengan kata lain 29,15 persen penduduk Maluku Barat Daya tergolong sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar kurang lebih 120 orang dibandingkan dengan kondisi 2019 yang sebesar 21,49 ribu orang (29,43 persen). Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Indeks kemiskinan turun dari 5,81 pada tahun 2018 menjadi 5,46 pada tahun 2020. Penurunan P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mengalami

kenaikan sehingga cenderung mendekati garis kemiskinan. Artinya dibutuhkan biaya yang lebih sedikit pula untuk mengangkat orang miskin keluar dari kemiskinan. (Data yang di dapat dari BPS Kabupaten Maluku Barat Daya). Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah Seberapa besar Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat adakah pengaruh yang terjadi dalam realisasi dana desa dalam terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di lakukan pada Kabupaten Maluku Barat Daya. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya yang berjumlah 117 Desa. Dengan menggunakan kriteria pengambilan sampel adalah laporan Realisasi APBDes yaitu Dana desa dan data kemiskinan secara berturut-turut dari tahun 2017-2019, dimana 57 desa yangn masuk dalam kategori pengambilan sampel. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Teknik analisis data atau model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasional yang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: Variabel bebas (Dana Desa) dan Variabel terikat (Tingkat Kemiskinan). Dengan menggunakan Data Panel yang merupakan kombinasi antara data silang tempat *cross-section* dengan data runtun waktu *time series*. Untuk menguji hipotesis, digunakan model regresi liinier sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1$$

Keterangan :

Y = Kemiskinan

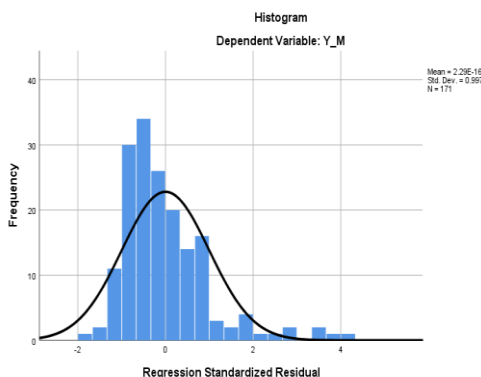
a = Konstanta

X = Dana Desa

### Hasil dan Pembahasan

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2017:127) terdapat dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistic. Analisis grafik ini salah satu cara termudah untuk mengetahui normalitas dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan data sampel laporan realisasi dana desa dan jumlah kemiskinan sebanyak 117 data realisasi dana desa dan tingkat kemiskinan dari 57 desa di kabupaten Maluku barat Daya, sehingga di perlukan pengujian statistic untuk mengetahui apakah data yang dikelola normal atau tidak. Dari gambar histogram menunjukkan titik masih ada di sekitar garis diagonal sehingga dapat di simpulkan bahwa data yang dikelola normal.



Bila rasio kurtosis dan skenews berada berada di arntara -2 hingga +2, bahawa distirubis data adalah normal (santoso,200:53). Dapat dilihat pad tabel menunjukan nilai skewness -870 dimana nilai tersebut kurang dari -2 dan nilai kurtosis sebesar 7,456 lebih dari 2 sehingga data yang diolah menunjukan bahawa data tersebut berdistribusi normal.

**Tabel 1.** Skewness dan Kurtosis

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	171	-.870	.186	7.456	.369

Valid N (listwise)	171				
--------------------	-----	--	--	--	--

**Hasil Pengujian Hipotesis**

**Hasil Uji Determinasi**

Untuk menjawab hipotesis ini maka kita akan melihat uji R-Square atau koefisien determinasi yang merupakan salah satu ukuran yang sederhana dan sering digunakan untuk menguji kualitas suatu persamaan garis regresi (Gujarati, 2004: 81). Pada tabel 4.2 menunjukkan Nilai R-Square memberikan gambaran tentang kesesuaian variabel independen dalam memprediksi variabel dependen.

**Tabel 2.** Uji Heteroskedastisitas

Model Summary <sup>b,c</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.715 <sup>a</sup>	.511	.508	5159149594.91100	1.953

a. Predictors: (Constant), Y\_M

b. Dependent Variable: X\_DD

c. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Tahun

Tabel Variables Entered menunjukkan variabel independent yang dimasukkan ke dalam model, Nilai R Square pada Tabel Model Summary adalah prosentase kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independent menjelaskan variabel dependent, R2 pada persamaan regresi rentan terhadap penambahan variabel independent, dimana semakin banyak variabel Independent yang terlibat, maka nilai R2 akan semakin besar, Karena itulah digunakan R2 pada analisis regresi berganda. Pada gambar output 4.2. terlihat nilai R Square adjusted sebesar 0,508, artinya variabel independent dalam hal ini jumlah kemsikinana dapat menjelaskan variabel dependent yaitu Dana Desa sebesar 50,8%, sedangkan 40,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam mode. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 50,8% dan 40,2% di tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh factor lain.

**Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)**

Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara simultan, yang ditunjukkan oleh dalam table ANOVA.

**Tabel 3.** Hasil Uji Secara Simultan, ANOVA<sup>a</sup> (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2324761246591123500.000	1	2324761246591123500.000	176.272	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2228853303166196990.000	169	13188481083823650.000		
	Total	4553614549757320200.000	170			

a. Dependent Variable: X\_DD

b. Predictors: (Constant), Y\_M

Uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara simultan dalam menerangkan variabel terikat. Uji simultan ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $\alpha$  (alpha) dengan nilai p-value. Apabila nilai p-value  $< \alpha$  (0,05), maka H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan sebaliknya. Jika nilai p-value  $> \alpha$  (0,05), maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

Berdasarkan hasil data yang telah diolah oleh peneliti maka dapat terlihat bahwa nilai p-value  $< \alpha$  (0,05) yaitu sebesar 0,000 atau nilai yang di dapat lebih kecil dari p-value artinya variable bebas berpengaruh positif terhadap variable terikat atau variable dana desa berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Maka dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dengan adanya dana desa yang terealisasi, akan berdampak pada tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan pengaruh secara keseluruhan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupetan Maluku barat daya, sehingga dengan demikian dapat di jelaskan bahwa dengan adanya dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada masyarakat, dapat mampu menjadi jembatan dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang terealisasi tiap tahun, menjadi salah satu cara yg dilakukan pemerintah desa menjawab kemiskian yang terjadi yaitu dengan menjamin kesejatheraan masyarakat miskin. Dengan demikian pengujian hipotesis H1 di terima yaitu Terdapat Pengaruh Anggaran Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan sehingga H0 di tolak. Hal ini sejalan dengan apa yang di teliti oleh Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan. Kesimpulan hasil penelitian atas alokasi dana desa ini adalah merupakan salah satu pendapatan desa yang memiliki pengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di pemerintah desa.

**Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial, ditunjukkan oleh Tabel Coefficients pada (Gambar 4.4),

**Tabel 4.** Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	701098750.729	12972557.320		54.045	.000
	Y_M	2039464.544	153603.296	.715	13.277	.000

a. Dependent Variable: X\_DD

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Tahun

Nilai Unstandardized coefficients B untuk masing-masing variabel, Variabel Dana Desa mempengaruhi Jumlah Keuntungan yang disalurkan sebesar 2039464.544 Nilai ini positif artinya semakin besarnya Dana Desa, naik sebesar 1000 maka semakin mempengaruhi kemiskinan sebesar 2039464.544 satuan. Signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai Sig pada kolom terakhir, Nilai signifikansi untuk variabel dana desa sebesar 0,000, artinya variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan ketentuan nilai tingkat signifikan < 0,05, maka dapat dikatakan variabel dana desa sebagai variable bebas berpengaruh secara parsial terhadap variable tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Sehingga kesimpulannya adalah H1 diterima yaitu terdapat pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan H0 ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan, atau dengan kata lain Dana Desa mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

### Kesimpulan

Dalama penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan sangat terlihat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dimana terdapa kenaikan dalam anggaran dana desa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan bergeser. Pada tahun 2017 pengaruhnya sebesar 37,2%, 2018 pengaruhnya sebesar 73,9% dan pada tahun 2019 pengaruhnya sebesar 68,8% sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dana desa tiap tahunnya berubah bagi tiap desa. Dana Desa mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten Maluku Barat Daya un sebesar 50,8% dan 40,2% di pengaruhi oleh factor lain. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial Dana Desa berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di kabupetan Maluku barat daya. Dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau nilai yang di dapat lebih kecil dari p-value artinya variable bebas berpengaruh positif terhadap variable terikat atau variable dana desa berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Secara parsial Nilai Unstandardized coefficients B untuk masing-masing



variabel, Variabel Dana Desa mempengaruhi Jumlah Keuntungan yang disalurkan sebesar 2039464.544 Nilai ini positif artinya semakin besarnya Dana Desa, naik sebesar 1000 maka semakin mempengaruhi tingkat kemiskinan sebesar 2039464.544 satuan. Signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai Signifikan pada kolom terakhir, Nilai signifikansi untuk variabel dana desa sebesar 0,000, artinya variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Maka dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dengan adanya dana desa yang diperoleh, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan pengaruh secara keseluruhan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2017 sampai tahun 2019

### Daftar Pustaka

- Agus Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonesia
- Azwardi Sukanto. 2012. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. (Online), ([https://repository.unsri.ac.id/21091/2/JURNAL\\_3-Azwardi\\_%26\\_Sukanto.pdf](https://repository.unsri.ac.id/21091/2/JURNAL_3-Azwardi_%26_Sukanto.pdf)), di akses 22 Desember 2021
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kab.Maluku Barat Daya, 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Barat Daya 2021*. BPS, Tiakur
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dinas Sosial Kabupaten Maluku Barat Daya. Data BNBA KPM tahun 2017-2019
- Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, Warsilan 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara*. (Online) (Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12, (1), 2016. Di akses 22 Desember 2021)
- Joko Rangga Bawono, Erwin Setyadi, 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Indonesia: Jakarta
- Kemenkeu, Ditjen Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Kemenkeu, Jakarta



Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Maluku Barat Daya, 2017-2019*, DPMD Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Perbendaharaan, 02 November 2021.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/>

Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN

Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999, *Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*, Jakarta  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*, Jakarta  
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 15 Tahun 2018, *Sistem Layanan dan Rujukan terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu*, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No 72 Tahun 2005, *Desa*, Jakarta

Perda No 3 Tahun 2017, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, 2016-2021*

Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*. Sekretariat Negara, Jakarta

Sahid Raharjo, April 2013. *SPSS Indonesia Olah Data Statistik dengan SPSS*. (Onlien) (<http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-glejser-spss.html>)